

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA****3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumbawa telah menunjukkan kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial, warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial, antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial (volunteerism), dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni: adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa telah meningkat cukup berarti dari waktu ke waktu.

Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain:

1. Kondisi alam wilayah Kabupaten Sumbawa yang berbentuk pegunungan, sungai dan kelautan serta beriklim tropis menyebabkan rentannya Kabupaten Sumbawa mengalami bencana serta banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit terjangkau (terisolir) yang mengakibatkan sulitnya melakukan pelayanan sosial dasar bagi PMKS secara menyeluruh
2. Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi yaitu Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Jaminan Sosial dan Perlindungan Sosial, masih sangat terbatas
3. Kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain,



4. Pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran,
5. Peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri,
6. Peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal,
7. Kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan
8. Koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas.

Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial selama tahun 2011-2015, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial seperti tidak tersedianya tenaga penyuluh kesejahteraan sosial, terbatasnya dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersediaan legal formal turut memberi pengaruh terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif maupun kuantitatif. Kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021, Visi dari Pembangunan Kabupaten Sumbawa 2016-2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Sumbawa Yang Berdaya Saing, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Semangat Gotong Royong”*** yang diwujudkan melalui tujuh misi pembangunan daerah yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Mewujudkan birokrasi yang bersih, handal dan profesional sehingga mampu menjalankan pemerintahan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*).
3. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dengan membangun sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
4. Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja.
5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan masyarakat yang religius dan memelihara toleransi antar umat beragama.
7. Memelihara dan mengembangkan potensi budaya dan kearifan lokal.

Adapun misi yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa adalah :

1. Misi Pertama yakni Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan tujuan meningkatnya efektivitas layanan kesejahteraan sosial dan sasaran yang ingin dicapai adalah : tersedianya sarana prasarana pelayanan sosial dasar yang memadai; termanfaatkannya data basis kemiskinan terpadu yang menyeluruh; tersedianya tenaga sosial yang terampil dan profesional; tersedianya bantuan sosial yang memadai.
2. Misi keempat yakni Mengembangkan potensi unggulan daerah dan meningkatkan produktivitas usaha masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan perluasan lapangan kerja dengan tujuan menurunnya ketimpangan dan kemiskinan dengan sasaran yang ingin dicapai adalah Tersedianya sarana prasarana perekonomian yang memadai; tersedianya sarana prasarana layanan sosial dasar yang memadai; tersalurnya bantuan sosial yang memadai

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Sumbawa tersebut, Dinas Sosial selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani penyandang masalah sosial, berupaya menselaraskan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Program-program penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial dalam rangka penyampaian visi dan misi dinas tidak terlepas dari peran, dukungan dan kerja sama semua stakeholders pembangunan kesejahteraan sosial terutama masyarakat dan dunia usaha. Dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang diemban oleh Dinas Sosial dibutuhkan berbagai program dan kegiatan dalam hal pembangunan kesejahteraan sosial yang bersentuhan langsung dengan penanganan masalah kesejahteraan sosial.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Sosial RI Tahun 2015-2019 dijelaskan Visi dari Kementerian Sosial yang juga merupakan visi pembangunan nasional yaitu "*Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Nilai dan Semangat Gotong Royong*" dimana dalam upaya pencapaiannya dilaksanakan melalui 7 misi pembangunan nasional yaitu :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan
2. Mewujudkan penduduk maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum
3. Mewujudkan politik luar negeri yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional
7. Mewujudkan penduduk yang berkepribadian dalam kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengurus bidang sosial, Kementerian Sosial RI dalam 5 tahun kedepan (2015-2019) akan melaksanakan 1 (satu) dari 7 (tujuh) misi pemerintah, yaitu misi keempat "Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera".

Adapun tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah :

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Penyelenggara Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kementerian Sosial melaksanakan 4 Program Teknis yaitu :

1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
2. Program Rehabilitasi Sosial
3. Program Pemberdayaan Sosial
4. Program Penanganan Fakir Miskin

Adapun visi dari Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi NTB seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2013-2018 yaitu ***“Terwujudnya Derajat Kesejahteraan Penyandang Masalah Sosial dan Terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan Masyarakat NTB Tahun 2018”***. Untuk mencapai visi tersebut, dilaksanakan beberapa misi. Misi yang terkait dengan urusan sosial yaitu :

1. Meningkatkan kemampuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dalam memenuhi kebutuhan dasar
2. Memberdayakan potensi penyandang masalah kesejahteraan sosial
3. Menumbuh kembangkan kepercayaan diri dan harga diri Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Meningkatkan fasilitas pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial klien dalam panti
5. Meningkatkan profesionalitas dan kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia dalam membangun usaha-usaha kesejahteraan sosial
6. Mengoptimalkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan pembangunan dibidang sosial dan pengentasan kemiskinan

Visi, misi dan tujuan akhir yang ingin dicapai Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Prop. NTB selaras dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Sumbawa. Dinas Sosial yang berkewajiban melaksanakan urusan sosial merumuskan beberapa program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Program/kegiatan tersebut merujuk pada program teknis yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial dan beberapa program/kegiatan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi NTB agar terjadi kesinambungan dan sinergitas antara program pusat, provinsi dan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana tata ruang Kabupaten Sumbawa meliputi seluruh wilayah Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Timur : Kabupaten Dompu
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa Barat

Secara administrasi wilayah perencanaan terdiri atas 24 wilayah kecamatan, 157 Desa dan 8 Kelurahan dengan luas wilayah 11.556,44 km², terdiri dari wilayah daratan 6.643,98 km², dan wilayah perairan laut 4.912,46 km².

Dengan keadaan geografis Wilayah Indonesia yang dikepung oleh lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik sehingga berdasarkan catatan dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami termasuk didalamnya Kabupaten Sumbawa yang termasuk sebagai daerah rawan bencana seperti :

a. Kawasan rawan bencana banjir

Kawasan rawan bencana banjir di Kabupaten Sumbawa terdapat di sepanjang aliran sungai Brang Sumbawa (Kecamatan Sumbawa), Sungai Brang Beh (Kecamatan Lunyuk) dan Brang Empang (Kecamatan Empang) serta sungai di Kecamatan Empang

b. Kawasan rawan bencana tanah longsor

Daerah yang rawan terhadap bencana tanah longsor adalah sepanjang jalur jalan Orong Telu-Ropang-Lunyuk-Jalur ke Sumbawa Barat dan pada desa-desa di Kecamatan Batu Lanteh. Daerah rawan longsor sebenarnya adalah salah satu akibat atau dampak negatif dari penebangan/penggundulan. Daerah yang rawan terhadap longsor di Kabupaten Sumbawa meliputi wilayah perbukitan dan daerah aliran sungai.

c. Kawasan rawan tsunami

Hampir seluruh pantai Selatan termasuk di Kabupaten Sumbawa merupakan kawasan rawan tsunami. Untuk ini diperlukan penanganan teknis dan peningkatan perluasan kawasan lindung untuk menghindari/ mengurangi resiko kemungkinan terjadinya tsunami. Di wilayah NTB, Kabupaten Sumbawa merupakan kawasan rawan tsunami dengan resiko tinggi. Penetapan daerah tsunami adalah daerah bahaya dengan jarak 3500 m dari garis pasang tertinggi. Pengembangan lokasi permukiman sebaiknya berada di belakang daerah bahaya yang terdiri dari beberapa zona yang berfungsi untuk memecah gelombang tsunami dan memperlambat Kecamatan gelombang serta revitalisasi ekosistem pesisir.



d. Kawasan rawan bencana alam lainnya

Bencana lainnya yang kerap terjadi di wilayah Kabupaten Sumbawa yaitu bahaya angin puyuh dan terjadi hampir setiap tahun. Dampak dari bencana angin puyuh ini adalah dapat mengakibatkan robohnya bangunan permukiman penduduk, tumbangnya pepohonan maupun tanaman pertanian dan lainnya. Untuk menanggulangi bahaya angin puyuh ini pada dasarnya tidak dapat dilakukan karena termasuk dari gejala alam yang belum dapat diprediksi tetapi yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi bahaya, misalnya memperkuat konstruksi bangunan, mengusahakan di sekitar bangunan tidak ada tanaman yang besar serta tinggi.

Rawannya wilayah Sumbawa mengalami bencana membutuhkan penanganan bencana yang lebih maksimal.

Selain berkenaan dengan bencana, kondisi alam Sumbawa yang tidak rata dan cenderung berbukit juga mengakibatkan banyaknya penduduk yang tinggal di daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh sarana dan prasarana sehingga mengakibatkan tidak meratanya pembangunan daerah dan membuat penduduknya terisolir. Daerah terisolir atau Komunitas Adat Terpencil mendapat penanganan khusus dari Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dengan melakukan kegiatan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

Upaya pemberdayaan ini dilaksanakan dalam rangka pengembangan kemandirian Komunitas Adat Terpencil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya agar mampu menanggapi perubahan sosial budaya dan lingkungan hidupnya serta agar masyarakat yang tinggal di daerah terpencil tersebut tidak jauh tertinggal dengan masyarakat yang ada dipertanian.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Percepatan pembangunan harus berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kabupaten Sumbawa yang merupakan sebuah Kabupaten yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA) sepatutnya memprioritaskan pengelolaan SDA terbaharui. Titik tumpu pengelolaan SDA harus berkiblat pada keberlanjutan masa depan lingkungan dan memihak kepentingan rakyat miskin.

Dengan berlakunya otonomi daerah telah mendorong persaingan daerah didalam pengelolaan sumberdaya daerah. Empat aspek pokok yang selalu mewarnai permasalahan pembangunan di daerah yaitu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Buatan (SDB) dan Sumber Daya Sosial (SDS). Antara satu dengan lainnya saling terkait dan saling mempengaruhi.

Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang kewenangan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh akan mampu

memberikan daya ungkit dalam mewujudkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa, dan salah satu bidang pembangunan tersebut adalah Bidang Sosial.

Memperhatikan hal tersebut di atas, bidang Sosial sebagai bagian dari fokus Pembangunan Kesejahteraan Sosial, berorientasi bagi pemecahan masalah kesejahteraan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan sosial bagi individu, kelompok dan masyarakat dalam kerangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sesuai dengan kapasitas target sasaran garapannya.

Ada beberapa isu strategis, strategi, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sumbawa yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Isu Strategis, Strategi, Arah Kebijakan dan Kebijakan Umum Pembangunan
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021

Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
1. Kualitas Sumber Daya Manusia	1. Konstruksi dan Rehabilitasi 2. Edukasi dan fasilitasi 3. Distribusi dan Fasilitasi	1. Rumah Singgah dan Panti 2. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) 3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Potensi Unggulan Daerah dan Produktivitas Masyarakat	Konstruksi, Rehabilitasi, Revitalisasi dan Distribusi	Keluarga Sangat Miskin (KSM)

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi Dinas Daerah Kabupaten Sumbawa dan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 7 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa. Tugas dan fungsi dimaksud adalah memimpin, melakukan koordinasi pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang sosial yang merupakan urusan pemerintah Kabupaten dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Bupati serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dikemas oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa antara lain :

1. Peningkatan Pelayanan Sosial dasar bagi PMKS
2. Penyelenggaraan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Manajemen Usaha Kesejahteraan Sosial
4. Penanggulangan korban bencana alam dan kejadian luar biasa
5. Penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan SDM aparatur

Arah Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial tersebut di atas, berangkat dari isu-isu strategis yang masih perlu mendapatkan penanganan yang serius yaitu :

1. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial
2. Tingginya angka keterlantaran anak dan lanjut usia
3. Masih rendahnya kualitas pelayanan dan rehabilitasi bagi PMKS
4. Banyaknya Korban tindak kekerasan terhadap anak perempuan dan pekerja migran
5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah sosial di lingkungannya
6. Tingginya frekwensi kejadian bencana alam dan sosial
7. Masih adanya komunitas yang terisolir
8. Masih rendahnya kualitas pelayanan sosial kepada masyarakat

Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa memiliki potensi besar dalam pencapaian target yang dilatarbelakangi oleh isu-isu strategis di atas.